

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan diiringi dengan meningkatnya kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang meliputi sandang, pangan, dan papan secara tidak langsung dapat menyebabkan lingkungan ikut dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan pangan ini telah diatur pemerintah dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 yakni “Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas (Anonymous, 2016).

Pembangunan pertanian diartikan sebagai rangkaian berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, memantapkan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani (Kementerian Pertanian, 2015).

Tahun 2016 lalu, Kementerian Pertanian telah meluncurkan program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) sebagai upaya percepatan peningkatan populasi sapi bunting dan melahirkan dengan baik untuk tercapainya swasembada daging di Indonesia. Upsus Siwab mempunyai dua program utama, yaitu Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA). Program ini menargetkan 70% dari 5,9 juta ekor sapi betina dewasa, yaitu sekitar 4 juta ekor, akan dijadikan asektor (ternak yang di IB) dengan kebuntingan dan kelahiran yang diharapkan adalah 3 juta ekor atau 73% dari asektor.

Tabel 1.1. Produksi daging sapi menurut Provinsi

Provinsi	Produksi Daging Sapi menurut Provinsi (Ton)		
	2018	2019	2020
ACEH	11524.28	10416.20	10740.15
SUMATERA UTARA	15240.33	14153.16	14569.88
SUMATERA BARAT	20298.94	21589.63	22021.89
RIAU	9792.53	8379.10	8611.02
JAMBI	4540.06	5026.46	5094.19
SUMATERA SELATAN	11261.05	11455.31	11615.04
BENGGKULU	2471.91	2587.44	3149.10
LAMPUNG	13332.35	14326.19	13522.13
KEP. BANGKA BELITUNG	3065.93	3212.58	3015.31
KEP. RIAU	1164.33	1384.08	1400.91
DKI JAKARTA	15867.13	19194.53	19194.53
JAWA BARAT	81625.91	79481.14	82947.88
JAWA TENGAH	64755.61	66681.14	64154.43
DI YOGYAKARTA	9272.92	7835.21	7338.04
JAWA TIMUR	96727.91	103291.79	105874.08
BANTEN	34946.23	37328.57	41394.26
BALI	7431.38	8255.84	9081.40
NUSA TENGGARA BARAT	9551.84	10202.83	10961.61
NUSA TENGGARA TIMUR	11761.40	10851.00	13116.45
KALIMANTAN BARAT	5447.37	5350.23	5403.99
KALIMANTAN TENGAH	3822.07	3786.73	3851.25
KALIMANTAN SELATAN	7237.91	6219.69	6457.56
KALIMANTAN TIMUR	7944.06	7653.63	7489.02
KALIMANTAN UTARA	639.02	583.07	590.81
SULAWESI UTARA	3518.33	3693.68	3484.20
SULAWESI TENGAH	4693.39	4790.41	5010.52
SULAWESI SELATAN	19696.50	17926.13	18184.22
SULAWESI TENGGARA	6474.83	4437.75	4405.09
GORONTALO	4250.17	3830.06	1924.48
SULAWESI BARAT	2266.15	2115.86	2174.75
MALUKU	2122.73	2201.00	2193.05
MALUKU UTARA	939.89	959.56	860.04
PAPUA BARAT	1914.77	1941.93	1969.68
PAPUA	2372.50	3660.38	3826.80
INDONESIA	497971.70	504802.29	515627.74

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah produksi daging di Indonesia terlihat pada tahun 2020 jumlah produksi daging mencapai 515627.74 ton. Padahal pada tahun 2020 konsumsi per kapita daging sapi total sebesar 2,31 kg/kapita/tahun dikalikan jumlah penduduk berdasarkan data BPS 269,60 juta orang maka kebutuhan nasional sekitar 623,42 ribu ton. Hasil perhitungan produksi daging ruminansia tahun 2020 sebesar 422,53 ribu ton. Yang berasal dari sapi potong sebesar 402,22 ribu ton. Sisanya dari sapi perah dan kerbau.

Jumlah konsumsi protein hewani selama ini dinilai masih kurang dari nilai konsumsi protein hewani standar Pola Pangan Harapan (PPH). Tingkat konsumsi protein hewani di Indonesia hanya 4,7 gram/ orang/ hari. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina yang rata-rata 10 gram/ orang/ hari.

Untuk lebih mendongkrak tercapainya swasembada daging 2026 mendatang, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) di tahun 2020 mencanangkan program baru yang dinamai Sapi-Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN). Program tersebut merupakan program lanjutan dari program sebelumnya Upsus Siwab. Pilihan sapi dan kerbau dikarenakan daging sapi dan kerbau sebagai sumber protein hewani yang paling digemari masyarakat. Sayangnya, tingginya permintaan pasar akan daging berbanding terbalik dengan produksi daging dalam negeri yang belum optimal. Lambatnya pertumbuhan populasi sapi dan kerbau dalam negeri umumnya dikarenakan manajemen reproduksi ternak yang belum optimal. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia masih harus melakukan impor daging.

Dengan demikian usaha peternakan masih berpotensi untuk dikembangkan. Peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian, yaitu mencakup perunggasan (misalnya, ayam dan itik), ruminansia kecil (misalnya, kambing dan domba) dan ruminansia besar (misalnya, sapi dan kerbau). Disamping itu, juga termasuk produk hasil peternakan seperti daging, telur, dan susu.

Berdasarkan data Populasi sapi potong di Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 sebanyak 128.609 ekor menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu penyumbang populasi sapi di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan total populasi di Jawa Timur sebanyak 4.815.330 ekor (Biro Pusat Statistik, 2021), walaupun hanya 2.6 % dari total populasi. Berdasarkan keadaan dimaksud tersebut patutlah kiranya ditunjang dengan adanya dukungan dari pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mendukung keberlanjutan populasi sapi Kabupaten Banyuwangi sehingga jumlahnya bisa bertambah. Dukungan tersebut salah satunya bisa dengan adanya program Optimalisasi Penanganan Gangguan Reproduksi. Berdasarkan data beberapa penelitian didapatkan jumlah gangguan reproduksi yang masih tinggi. Agung Budiyanto, Tarsisius Considus Tophianong, Triguntoro, Henny Kusuma Dewi (2016) melakukan penelitian tentang kondisi gangguan reproduksi dan respon kesembuhannya. Sebanyak 333 ekor sapi betina, 57,95 % mengalami gangguan reproduksi. Sehingga pelaksanaan optimalisasi reproduksi harus tetap menjadi prioritas utama kebijakan Pemerintah.

Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya reproduksi yang rendah pada ternak dapat dibagi menjadi 5 kelompok (Hardjoprاندjoto,1995) yaitu (1) kelompok ternak yang menderita gangguan keseimbangan hormon, khususnya hormon reproduksi, (2) menderita penyakit pada alat kelamin khususnya penyakit kelamin menular, (3) menderita kelainan anatomi pada alat kelamin yang bersifat genetik, (4) menderita kelainan patologi pada alat kelamin, (5) Kelompok ternak yang dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang serasi.

Faktor-faktor di atas dalam mempengaruhi proses reproduksi dapat bersifat tunggal, tetapi dapat pula bersifat majemuk yaitu gangguan reproduksi dapat disebabkan oleh gabungan beberapa faktor yang saling memperberat keadaan. Gangguan akibat beberapa faktor menyebabkan diagnosa menjadi lebih sulit demikian pula penanggulangannya. Reproduksi yang rendah pada sapi potong sampai saat ini sudah diketahui penyebabnya sehingga perlu dikaji tentang analisis

kebijakan penanggulangan gangguan reproduksi sapi potong guna mendukung pencapaian swasembada daging di Kabupaten Banyuwangi.

Faktor penghambat yang diduga sebagai penyebab rendahnya produktivitas ternak di Kabupaten Banyuwangi adalah manajemen pemeliharaan yang belum optimal. Hal ini ditandai dengan sistem pemeliharaan bersifat ekstensif (*tradisional*), usaha sambilan (*non agribusiness oriented*) dan tidak memperhatikan input produksi.

Kelemahan pengembangan sapi potong yang lain adalah karena faktor rendahnya reproduksi. Reproduksi merupakan proses perkembangbiakan suatu makhluk hidup, dimulai sejak bersatunya sel telur betina dengan sel mani jantan menjadi makhluk baru yang disebut *zygot*, disusul dengan kebuntingan dan diakhiri dengan kelahiran anak. Pada ternak, proses reproduksi dimulai setelah hewan betina dan hewan jantan mencapai dewasa kelamin atau pubertas. Oleh karena itu mempelajari proses reproduksi diperlukan pemahaman ilmu yang lain tentang alat kelamin, seperti proses *fisiologis, anatomi, embriologi, mikrobiologi, endokrinologi* dan lain-lain. Gangguan proses reproduksi dapat menyebabkan kemajiran pada ternak, baik pada ternak betina maupun jantan (Hardjopranjoto, 1995).

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan kajian adanya kebijakan penanggulangan gangguan reproduksi. Sehubungan dengan uraian di atas itulah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penentuan Prioritas Kebijakan Penanggulangan Gangguan Reproduksi Sapi Potong Guna Mendukung Pencapaian Swasembada Daging Sapi di Kabupaten Banyuwangi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas timbul beberapa permasalahan yang perlu dijawab dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa saja jenis kelainan gangguan reproduksi pada sapi potong dalam 3 bulan di Kabupaten Banyuwangi.

2. Faktor apa saja yang menyebabkan gangguan reproduksi pada sapi potong di Kabupaten Banyuwangi.
3. Bagaimana analisis Penentuan Prioritas Kebijakan Penanggulangan Gangguan Reproduksi Sapi Potong Guna Mendukung Pencapaian Swasembada Daging Sapi di Kabupaten Banyuwangi.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi jenis kelainan gangguan reproduksi pada sapi potong dalam 3 bulan di Kabupaten Banyuwangi.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor - faktor penyebab gangguan reproduksi pada sapi potong di wilayah Kabupaten Banyuwangi
3. Merumuskan Penentuan Prioritas Kebijakan Penanggulangan Gangguan Reproduksi Sapi Potong Guna Mendukung Pencapaian Swasembada Daging Sapi di Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi atau acuan ilmiah bagi semua pihak terkait untuk :

1. Menjadi pedoman bagi peternak dalam pengelolaan usaha peternakan sapi potong.
2. Menjadi acuan dan data penunjang bagi penelitian selanjutnya.
3. Merumuskan sumbangan pemikiran bagi Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Banyuwangi dan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun

kebijakan pembangunan peternakan guna mendukung pencapaian swasembada daging sapi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, penetapan lokasi didasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu sentra pengembangan budidaya sapi potong dalam rangka percepatan pencapaian swasembada daging sapi.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian tentang analisis Kebijakan Penanggulangan Gangguan Reproduksi Sapi Potong Guna Mendukung Pencapaian Swasembada Daging Sapi di Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan menggunakan metode dengan survei (kuantitatif deskriptif), dilanjutkan menggunakan analisa SWOT dan QSPM. Penentuan responden dengan *purposive sampling* berdasarkan kriteria 1) peternak di wilayah Kecamatan Wonsorejo dan Kecamatan Kalipuro 2) peternak yang memiliki gangguan reproduksi di ternaknya ditandai dengan telah dilaksanakan inseminasi sebanyak 3 (tiga) kali dan belum bunting 3) Pihak terkait. Perolehan data dianalisis menggunakan analisis SWOT dan QSPM.